

Dinas Bina Marga DKI Lanjutkan Program Revitalisasi Trotoar

JAKARTA (IM) - Dinas Bina Marga DKI Jakarta melanjutkan program revitalisasi trotoar. Akhir tahun ini, program yang mulai dikerjakan masif di era Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini menyasar lokasi Jalan Medan Merdeka Selatan tepatnya di titik depan Perpustakaan Nasional, Balai Kota DKI, Istana Wakil Presiden hingga dekat Stasiun Gambir.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan di lokasi ini revitalisasi trotoar tidak menggunakan APBD tetapi menggunakan dana kewajiban pengembang sebesar Rp28,1 miliar. Ia pun menegaskan revitalisasi trotoar dilakukan sesuai standar yang sudah ada yakni di bawahnya akan menjadi saluran air serta tersedia jaringan utilitas bawah tanah, memilih guiding block, hingga pelican crossing untuk menyeberang

ke arah Monumen Nasional dan Halte Transjakarta. "Ya sesuai standar yang sudah ada," ungkap Hari saat dihubungi, kemarin.

Hari menuturkan pelican crossing yang sudah ada tepat di depan Perpustakaan Nasional akan digeser ke arah timur sejauh 50 meter atau mendekati Balai Kota DKI. Selain itu, dalam program ini rencananya pagar Stasiun Gambir akan dibuka dan ada perubahan untuk akses keluar masuk stasiun. Ia juga menegaskan tidak ada pohon-pohon yang ditebang di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. "Hanya sedikit jalur hijau dan rumput," ungkapnya.

Ia juga memastikan ada sisi trotoar tepat di pelican crossing yang landai sehingga pejalan kaki maupun penyandang disabilitas bisa menyeberang jalan dengan nyaman. Sementara itu, revitalisasi ini ditargetkan akan selesai akhir tahun ini. ● yan



FOTO: ANT

REALISASI BANTUAN SUBSIDI UPAH

Petugas PT Pos Indonesia (kedua kiri) mendokumentasikan warga penerima bantuan subsidi upah (BSU) di PT Pos Indonesia KP Premier Jakarta Timur, Pulogadung, Jakarta, Jumat (9/12). Kementerian Ketenagakerjaan per 5 Desember 2022 mencatat BSU telah tersalurkan kepada 11,67 juta penerima.

Pemprov DKI Pasang 12 Sensor Pemantau Udara di Ruas Jalan Gage

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba pemasangan sensor pemantauan berbiaya rendah atau low cost sensor (LCS). Sebanyak 12 sensor pemantauan udara itu ditempatkan di ruas jalan yang menerapkan ganjal genap.

"Sebagai salah satu pengembangan pelaksanaan pemantauan kualitas udara di DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta juga melakukan uji coba pemasangan sensor pemantauan berbiaya rendah (Low Cost Sensor/LCS)," kata Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melalui Instagramnya, @dinaslhdkj, seperti dilihat Jumat (9/12).

Dinas LH menuturkan keberadaan LCS dapat memperluas jangkauan pemantauan udara di DKI Jakarta sekaligus melengkapi stasiun pemantauan kualitas udara (SPKU) yang sudah ada. Sebab, saat ini DKI memiliki lima stasiun pemantauan kualitas udara (SPKU) standar referensi yang tersebar di setiap wilayah Kota.

"Sebanyak 12 alat sensor pemantauan udara ini ditem-

patkan berdampingan dengan sensor traffic counting di ruas jalan yang diberlakukan ganjal genap," terangnya.

Dimintai konfirmasi terpisah, Penjabat Humas Dinas LH DKI Jakarta, Yogi Ikhwan menjelaskan alat pemantauan udara ini berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan ganjal genap. Nantinya pihaknya bisa menelusuri efektivitas pelaksanaan gage, terutama dalam pengendalian polusi.

"Iu sekarang diterangkan mengukur manfaat kebijakan ganjal genap terhadap penurunan pencemaran emisi udara. Hipotesisnya sih pasti turun ya, karena jumlah kendaraan jadi berkurang lewat situ," kata Yogi saat dihubungi, Jumat (9/12).

Yogi menyampaikan proses analisis menggunakan LCS membutuhkan waktu sebulan. Barulah setelah itu, hasil analisis akan disampaikan kepada publik. Nantinya, jumlah LCS akan terus ditambah hingga seluruh ruas jalan gage. "Sensor belum bisa dilihat online, karena harus di analisis dulu. Tapi hasil analisisnya kita rilis, ya," imbuhnya. ● yan

Pemprov DKI Bangun Sky Bridge Atas Parkir Liar di Kawasan Grand Indonesia

JAKARTA (IM) - Banyaknya parkir liar di kawasan Grand Indonesia (GI), Bundaran HI karena banyak perkantoran dan mal di wilayah tersebut membuat kemacetan yang sangat parah. Kepala Suku Dinas (Kasudin) Perhubungan Jakarta Pusat, Wildan Anwar mengatakan, parkir liar itu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Setelah saya observasi, ternyata pemasukan parkir para pegawai kantor dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak resmi," ujar Wildan kepada wartawan saat dihubungi, dikutip Jumat (9/12).

Dalam hal ini kata dia,

pihaknya telah berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Pusat untuk membangun sky bridge seperti di kawasan Tanah Abang untuk mengatasi parkir liar.

"Dari Wali Kota Jakarta Pusat, ada konsep terpadu. Tidak hanya untuk tempat parkir, tetapi juga untuk pedagang kaki lima," papar dia.

Dikatakan Wildan, lokasi sky bridge tersebut rencananya akan ditempatkan di daerah Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Sudah beberapa kali rapat, secara lisan juga sudah menyampaikan. Semoga 2023 nanti, akan dibangun sky bridge di Kebon Kacang, kemungkinan pedagang kaki lima akan dinaikkan ke atas," imbuh dia.

Wildan menuturkan, untuk saat ini pihaknya akan secara rutin melakukan penindakan bersama Petugas Dishub untuk mengangkut motor-motor yang parkir liar di kawasan tersebut.

Hal ini dikarenakan kantong parkir liar menimbulkan kemacetan parah di kawasan tersebut. "Kami lakukan penindakan berupa angkut jaring, dinaikkan ke truk dan kita bawa ke kantor Kasudin Perhubungan di Senen," jelas Wildan. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



PESERTA KEGIATAN SAILING CAMP

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) berbin-cang dengan anggota Pramuka usai upacara pelepasan Sailing Camp di Dermaga Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (9/12). TNI AL menggelar kegiatan Sailing Camp yang merupakan rangkaian Hari Armada RI di Pulau Sebaru Kepulauan Seribu yang diikuti 300 peserta Pramuka Saka Bahari binaan Koarmada Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) dan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) selama tiga hari.

Eks Plt Gubernur DKI Minta Proses Lelang Jabatan Sekda Berlangsung Transparan

Eks Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono berharap, Sekda DKI nantinya dapat saling melengkapi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Keduanya, menurut dia, harus memiliki visi yang sama.

JAKARTA (IM) - Eks

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono menegaskan proses lelang jabatan sekretaris daerah (sekda) DKI Jakarta harus dilakukan secara transparan. Menurut dia, siapa saja yang sesuai dengan kriteria sekda DKI dipersilakan mendaftar lelang tersebut. Karena itu, proses lelang jabatan strategis ini harus dilakukan secara transparan.

"Yang penting sifatnya (proses lelang) terbuka kepada siapa saja yang memiliki kualifikasi, silakan melamar. Keterbukaan penting," ujar Soni kepada awak media, Ju-

mat (9/12).

Ia melanjutkan, panitia proses lelang jabatan sekda DKI ini juga tak diperkenankan menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dari sang pendaftar. Panitia proses lelang, menurut Soni, harus menilai kompetensi sang pendaftar lelang jabatan secara objektif. Ia menilai, hal terpenting yang harus dimiliki sang pendaftar lelang jabatan sekda DKI adalah menguasai kompetensi pemerintahan.

"Jadi kalau sekda (DKI) menyeluruh, kemampuan pemerintahan nomor satu. Kompetensi nomor satu, yang penting kemampuan ideologi

pancasailais," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Soni berharap sekda DKI nantinya dapat saling melengkapi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Keduanya, menurut dia, harus memiliki visi yang sama.

"Paling tidak kemistri ketemu dengan baik, dan paling penting lagi punya integritas dan komitmen dalam memberi layanan kepada gubernur sebagai pimpinannya, yang penting itu," urai Soni.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku tengah mempersiapkan proses lelang jabatan sekda DKI Jakarta. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya menyatakan, jajarannya akan mengumumkan pembukaan proses lelang saat semua telah disiapkan.

"Kalau ada (lelang jabatan sekda DKI), akan diumumkan secara terbuka," ujar Maria kepada awak media, Kamis (8/12).

Pemkot Depok Akui Proyek Trotoar Margonda Molor

DEPOK (IM) -Pengerjaan proyek trotoar tidak sesuai target, seharusnya proyek tersebut selesai 16 Desember 2022. Namun karena terdapat sejumlah kendala maka proyek tersebut akan diperpanjang.

Pengajuan perpanjangan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok ke Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (T'4PD).

"Kemarin ada pendampingan, akan ada sedikit toleransi waktu. Mereka (PUPR) minta toleransi waktu karena banyak gangguan teknis. Kayak main bola lah, ada stop. Ini kan berarti ada perpanjangan waktu dikit, biasa itu," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, Jumat (9/12).

Waktu perpanjangan tergantung dari kejaksaan. Kendala yang dimaksud, dia men-

erangkan, banyak pemilik toko yang tidak mau memundurkan bangunan. Padahal mereka tidak memiliki lahan parkir.

"Banyak kendalanya di antaranya mereka pemilik toko yang tidak mau mundur padahal mereka ngga punya parkir," ungkapnya.

Piuhannya mengaku sedang memikirkan kendala teknis tersebut. Termasuk bagaimana mengatasi trotoar yang dipakai area parkir di Jalan Kartini. "Sekarang kita lagi mikir kan itu, termasuk toko-toko sepanjang jalan kartini sudah selesai trotoarnya tapi dipakai untuk parkir mereka padahal kan trotoar dan ini solusinya adalah mereka mundur untuk parkir," ujarnya.

Dikatakan kalau memang pemilik bangunan tidak bersedia mundur maka mereka bisa menjual pada pemerintah. Kemudian pemerintah akan

membeli lahan tersebut.

"Kalau mereka enggak mau ya tawarkan pada kami dan pemerintah akan beli," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Citra Yuliani mengatakan, perpanjangan akan dilakukan selama 10 hari. Ditargetkan dalam perpanjangan tersebut pekerjaan akan diselesaikan. "Pengajuan tambahan sampai 24 Desember. Dan kami sudah izin ke datun selaku jaksa pengacara negara," ujarnya.

Dia menyebutkan kendala yang terjadi karena waktu pengerjaan. Citra juga mengakui kendala lain karena pemilik toko yang tidak mau mundur. "Waktu pelaksanaan pekerjaannya hanya bisa di jam dilaksanakan pada jam tertentu. Jam berangkat kerja dan pulang kerja tidak bisa bekerja," pungkasnya. ● yan



FOTO: ANT

HARI TERAKHIR SISWA DI SDN POCIN 1 SEBELUM DIRELOKASI

Sejumlah siswa usai mengikuti ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) di SDN Pincin 1, Depok, Jawa Barat, Jumat (9/12/2022). Siswa SDN Pincin 1 melaksanakan ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) di sekolahnya hingga 9 Desember 2022 sebelum sekolah tersebut direlokasi ke SDN Pincin 3 dan SDN Pincin 5 karena lahannya akan dijadikan masjid.

Sewakan Aset Negara Secara Ilegal, Ketua Koperasi Saung Bekasi Ditangkap

BEKASI (IM) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menetapkan pria berinisial NH sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berwujud tanah dan bangunan di Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan.

Penetapan NH sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas dugaan adanya kerugian negara yang dilakukan NH saat memanfaatkan tanah dan bangunan milik Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.

"NH merupakan Ketua Pengurus Koperasi Saung Bekasi yang mengajukan permohonan menggunakan lahan seluas lima hektare untuk dijadikan tempat hasil pertanian pada 9 Agustus 2016," kata Kasi Intel Kejari Kabupaten Bekasi, Sivi Utomo, Jumat (9/12).

Sivi menjelaskan tersangka NH menggunakan lahan tersebut didasari atas izin pemanfaatan lahan yang diterbitkan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dengan Nomor : 525/10.48/DIS-TANBUNHUT tanggal 15 Agustus 2016. Berdasarkan temuan penyidik, Koperasi Saung Bekasi bahkan tidak memiliki legalitas berupa akta pendirian koperasi, tidak memiliki izin usaha, NPWP, rekening bank atas nama koperasi, laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengurus serta pengawas koperasi setiap tahunnya. Ia mengatakan penerbitan izin penggunaan lahan dan bangunan itu tidak sesuai dengan Permenadagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah Penggunaan Barang Milik Daerah. Lahan itu dimanfaatkan NH untuk mengelola parkir di Pasar Ikan Higienis kepada penjual, pembeli, dan petani. Selain itu ia juga menarik biaya sewa kepada penjual minuman ringan yang mendirikan bangunan semi permanen. "Per hari, satu orang pedagang yang menyewa lahan, ditarif sebesar Rp15 ribu untuk biaya listrik, keamanan, dan kebersihannya," ucapnya.

NH tidak pernah menyertakan hasil retribusi tersebut ke kas daerah Kabupaten Bekasi meski menarik biaya kepada pengunjung dan pedagang atas pemanfaatan BMD. "Tersangka NH mengakibatkan kerugian negara atas pendapatan sewa berupa PAD yang tak pernah disetorkan ke kas daerah sebesar kurang lebih Rp973 juta. Total kerugian merupakan hasil estimasi atas pemanfaatan lahan sejak 2016 sampai sekarang," katanya. NH disangkakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

NH ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 8 hingga 27 Desember 2022 mendatang untuk kepentingan penyidikan, termasuk mendalami keterlibatan pihak-pihak lain. "Tak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat, masih kami dalam," tegasnya. ● yan

PENGUMUMAN PENGURANGAN MODAL PT BUKIT MURIA JAYA KARTON ("Perseroan")

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan rencana penurunan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp. 1.263.448.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000.000,- Sesuai Pasal 45 ayat (1) UUPT, dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini, kreditur dapat mengajukan keberatan atas pengurangan modal tersebut dengan disertai alasannya kepada Direksi ke alamat Perseroan.

Jakarta, 10 Desember 2022
Direksi Perseroan
Menara Citicon lantai 18, Jl. S. Parman, Jakarta Barat

PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. JAKARTA SISTEM INTEGRATOS
Dengan ini diberitahukan kepada para KREDITUR PT. JAKARTA SISTEM INTEGRATOS, bahwa RUPS yang di selenggarakan di Kota Tangerang, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, telah diputuskan sebagai berikut:
- Menyetujui pengurangan Modal Dasar dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan modal disetor perseroan dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), atas pengurangan Modal Dasar dan Modal Setor perseroan, maka menyetujui untuk merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut.
Demikian hasil RUPS ini diberitahukan untuk diketahui.
Jakarta, 08 Desember 2022
Direksi